



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**



LKjIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan bagian penting dari serangkaian proses perencanaan suatu kegiatan, yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan suatu organisasi. Pelaporan Pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja kegiatan dan kinerja keuangan, sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan program kegiatan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan laporan pelaksanaan hasil kerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang merupakan pencapaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Tidak dapat dipungkiri bahwa capaian kinerja program kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023 belum mencapai hasil maksimal. Dengan demikian Laporan Kinerja menjadi bagian dari sistem pengendalian administrasi pemerintahan, yang diharapkan mampu menggambarkan kinerja dinas baik yang berhasil maupun yang pencapaiannya belum maksimal, dengan harapan ada perbaikan di masa mendatang.

Singaraja, 29 Desember 2023

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19691231 199103 1 053

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
D. Isu Strategis	2
E. Struktur Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	8
C. Perjanjian Kinerja	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023	23
2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	27
3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	30
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	43
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	44
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	45
7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	45
B. Realisasi Anggaran	46

BAB IV	PENUTUP	23
	A. Simpulan	49
	B. Langkah Perbaikan Ke Depan	49

LAMPIRAN

- 1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja
- 3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
- 4) Prestasi yang dicapai 3 (tiga) tahun terakhir

DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Dinas Sosial	6
--	---

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pelayanan masyarakat berorientasi kepada visi, misi dan tujuan suatu organisasi, dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin terjadi. Penyelenggaraan program kegiatan di bidang/urusan sosial pada Dinas Sosial sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Perjanjian Kinerja memuat sasaran, indikator kinerja, sasaran, target yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat operasional, dengan mengacu pada Renstra 2023-2026 dan Rencana Kerja tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan target yang ditetapkan dapat disimpulkan bahwa rata-rata sasaran tercapai dengan predikat sangat berhasil. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran di bidang sosial antar lain:

1. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
2. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
3. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responcibility (CSR) Dunia Usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Meskipun pencapaian sasaran relatif berhasil, namun demikian masih terdapat permasalahan sosial yang menjadi tantangan, diantaranya adalah:

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih relatif besar dengan permasalahan yang semakin kompleks.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pembuat laporan kinerja adalah

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Buleleng merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok "Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial" yaitu untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang sosial yang berhubungan dengan:

- a. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- b. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang Sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Isu Strategis

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang sosial. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial. Sedangkan dari segi teknis, fungsi yang diselenggarakan mencakup: Perumusan kebijakan di bidang Sosial; Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial; Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas sosial Kabupaten Buleleng telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat memberikan pelayanan dengan baik yang menyangkut pelayanan dan rehabilitasi sosial, perlindungan jaminan sosial, pemberdayaan lembaga sosial maupun pembinaan karang taruna, penataan dan pelestarian monumen serta penghayatan terhadap nilai-nilai kepahlawanan/kejuangan.

Program yang dilaksanakan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta mengurangi timbulnya masalah sosial baru. Program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan berkaitan dengan upaya penanganan Isu Strategis yaitu penanggulangan kemiskinan, penanggulangan penyandang cacat, penanggulangan keterlantaran, penanganan ketunaan sosial, penanggulangan bencana alam/sosial termasuk pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kejuangan.

Program dan kegiatan tersebut akan menjawab terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 terhadap program-program unggulan nasional sebagaimana dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial maupun pencapaian SDGs dalam penanggulangan kemiskinan.

Kondisi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Buleleng cenderung mengalami penurunan, namun di beberapa kategori mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan karena kompleksnya masalah sosial sehingga perlu penanganan yang terpadu. Berbagai kebijakan dan program serta kegiatan terus dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat terwujud, seperti meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Organisasi Sosial/Panti Sosial dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Secara umum capaian kinerja Dinas Sosial telah dapat mengurangi jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pola penanganan yang dikembangkan tersebut dapat berupa Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Sosial, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Bantuan Perbaikan Gizi (sembako) bagi anak terlantar/anak balita terlantar, lanjut usia terlantar, keluarga miskin, penyandang cacat, wanita rawan sosial ekonomi, anak nakal, maupun pembinaan terhadap panti sosial/organisasi sosial guna meningkatkan kapasitas maupun kualitas kehidupannya. Sedangkan, untuk penanganan kepada eks para korban diberikan advokasi, bimbingan, motivasi sosial dan keterampilan praktis sesuai dengan potensi keterampilan dasar yang dimiliki serta potensi daerah masing-masing seperti beternak babi/kambing/sapi dan seterusnya.

Terhadap beberapa kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami kenaikan seperti bertambahnya kasus Penyandang HIV/AIDS dan bahkan penyebarannya sampai keseluruhan wilayah kecamatan. Hal ini diakibatkan karena kondisi dan perkembangan globalisasi yang disalahgunakan. Namun demikian semua bentuk permasalahan sosial tersebut di atas, telah diupayakan penanganannya secara bertahap, terpadu dan berkesinambungan dengan OPD/Lembaga terkait.

Tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Sosial antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat kemiskinan yang juga cukup tinggi dengan sebaran yang begitu luas merupakan tantangan dalam upaya penanggulangan/pengentasannya.
- b. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan utamanya peningkatan akibat migrasi dari Luar Bali (Jatim) tidak dapat dipungkiri akan memunculkan kerawanan sosial;
- c. Penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial (Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan lain lain) merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan kapasitasnya sehingga mereka bisa berdaya dan mandiri dalam menjalani kehidupannya;
- d. Rentannya wilayah Buleleng terhadap Bencana Alam dan bahkan setiap tahun sering terjadi di beberapa wilayah kecamatan, hal ini menjadi tantangan dalam upaya penanganan masalah sosial akibat bencana dimaksud.
- e. Belum dimilikinya rumah singgah yang dipergunakan untuk menampung para tuna sosial (WTS, Gepeng, orang terlantar luar daerah dan penyelamatan korban eksploitasi anak dan perempuan).
- f. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Buleleng maka permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat ditanggulangi dalam waktu singkat.

Walaupun masalah sosial tidak dapat di hentikan ataupun di stop karena sifatnya yang dinamis sejalan dengan dinamika kehidupan manusia, namun Dinas Sosial Kabupaten Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga masalah sosial ataupun kerawanan sosial di Kabupaten Buleleng dapat di eliminir sejalan dengan tupoksi yang diembannya dengan mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya.

Adapun peluang dimaksud adalah:

- a. Adanya jalinan koordinasi yang sangat mantap dari berbagai OPD terkait dalam penanganan masalah sosial;
- b. Partisipasi lembaga sosial/organisasi sosial dan partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sosial;

- c. Adanya pedoman ataupun kebijakan yang menjadi pegangan dalam penanganan masalah sosial, sehingga penanganannya menjadi lebih jelas terarah dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Adanya dukungan anggaran dari pemerintah, baik Dari APBD Kabupaten Buleleng, APBD Provinsi Bali maupun APBN.

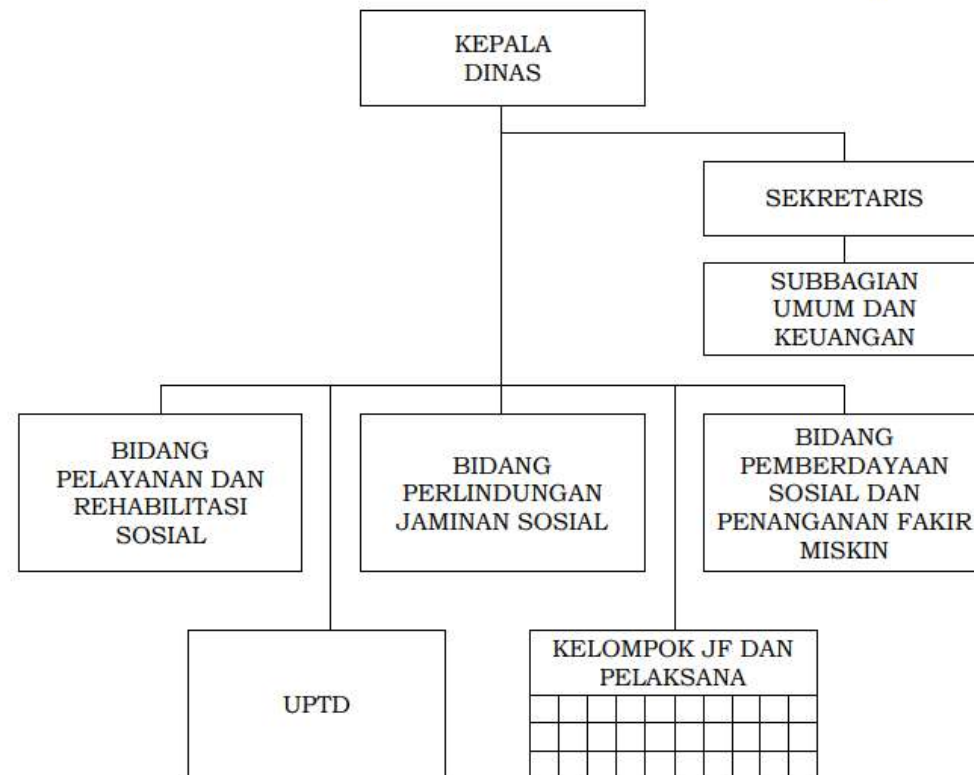
E. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Sekretariat, membawahi Subbagian Umum dan Keuangan;
- d. Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Perlindungan Jaminan Sosial;
- f. Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL TIPE B

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah menetapkan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023 telah menjawab Program dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan guna menjawab permasalahan sosial yang menjadi Urusan Sosial yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu empat tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan Tupoksi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2023 - 2026. Adapun tujuan dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial “, dengan sasaran pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Menurunnya Penduduk Miskin, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase penduduk miskin, dengan target: 5,15%
2. Meningkatnya Penanganan PMKS, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase penanganan PMKS, dengan target: 6,86%

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU), instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka

untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dirumuskan dalam tabel berikut.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Nomor : 400.9/2248.1/Dinsos/2022

Tanggal : 22 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial, sesuai dengan: 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	BPS adalah Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial, sesuai dengan: 1. UU nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 2. Permensos: 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Jumlah PMKS yang tertangani -----X 100% Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

Rencana Kinerja Tahunan yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat sasaran/capaian program, indikator kinerja, program dan kegiatan dimana merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS SOSIAL TAHUN 2023

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
1	Menurunnya penduduk miskin	1	Persentase penduduk miskin	5,15%	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	2.870.740.667	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	335.134.747	
								Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	190.580.000		
								Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	250.000.000		
								Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	2.095.025.920		
			Program		Meningkatnya	Persentase	557.139.930	Terlaksananya Pendataan	Jumlah Fakir Miskin	300.000.000		

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9	
			Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial yang tertangani		Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata			
							Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	257.139.930		
2	Meningkatnya penanganan PMKS	1	Persentase penanganan PMKS	6,86%	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	1.108.756.193	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Per Orang Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	350.000.000
							Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantuan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	167.518.709		
							Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.000.000		
							Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,	173.237.484		

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota		
							Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	318.000.000	
				Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	652.658.247	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/ kota	50.000.000	
							Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	100.000.000	
							Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	502.658.247	

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan		
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output				
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9		
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	Program Penanganan Bencana	Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	345.894.243	Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	345.894.243	
						Terwujudnya penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase penanganan bencana sesuai ketentuan yang berlaku	150.000.000	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	150.000.000	
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	1	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan dan hari-hari besar	Persentase nilai kepahlawanan dan hari-hari besar yang sesuai aturan	1.642.480.861	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	654.499.183	
									Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	937.981.678	

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan	
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output			
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9	
							Terlaksananya Penanganan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	50.000.000		
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	1	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Nilai AKIP yang baik, Jumlah penyebaran kuesioner pengguna layanan	350.991.178	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000
								Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.991.178	
						Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan, Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	5.320.506.230	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.581.882.500

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	453.784.406	
							Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	284.839.324	
					Jumlah layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	90.000.000	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15.000.000	
							Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75.000.000	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	425.385.860	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100.000.000	
							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	139.500.000	

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	139.161.880	
							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	29.051.780	
							Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.672.200	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.042.012.060	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96.844.514	
							Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	308.101.300	
							Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	290.160.000	

Sasaran / Capaian Program		Target/ Satuan	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	Kete- rangan
Uraian	Indikator Kinerja (Outcome)			Sasaran	Indikator Outcome		Sasaran	Indikator Output		
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	9
							Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	346.906.246	
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	1.280.200.538	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65.336.538	
							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64.864.000	
							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.150.000.000	
Total						15.836.766.007			15.836.766.007	

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang telah ditetapkan dan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	5,15%
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	6,86%
		Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan
		Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.334.641.787	APBD II
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	2.441.667.299	APBD II
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	6.964.155.468	APBD II
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	648.387.738	APBD II
5	Program Penanganan Bencana	Rp	230.164.253	APBD II
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	1.241.782.921	APBD II

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program. Adapun uraian sasaran dan indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1. Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin
		2. Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial	1. Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin
		2. Meningkatnya Penanganan PMKS	1. Persentase penanganan PMKS 2. Jumlah laporan Penanganan Penyandang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
			Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku 3. Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif
		3. Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
		4. Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan
		5. Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial

Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran diperoleh melalui penghitungan dengan formulasi tertentu, dan difokuskan pada indikator kinerja strategis.

Penetapan cara pengukuran capaian kinerja meliputi:

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Hasil pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran dan predikatnya sebagai berikut:

Capaian kinerja > 85 sd 100% : Sangat berhasil

Capaian kinerja >70 sd <85% : Berhasil

Capaian kinerja >55 sd <70% : Cukup berhasil

Capaian kinerja < 55 sd 0% : Tidak berhasil

1. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023:

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Tahun 2023 dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk miskin	5,15	5,85	113,59
2.	Persentase penanganan PMKS	6,86	23,95	349,12
Rata-Rata Capaian				231,35

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 231.35% dengan skala kriteria diperoleh dengan **predikat sangat berhasil** Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
1.	Persentase penduduk miskin	Realisasi Hasil Perhitungan BPS
2.	Persentase penanganan PMKS	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{3.226}{16.051} \times 100\%$ $= 20,09 \%$ <p>Untuk mendapatkan realisasi tahun 2023 maka di akumulasikan dengan tahun 2021 sebesar 3,86%, sehingga perhitungannya menjadi:</p> $= 20,09\% + 3,86\%$ $= 23,95 \%$

Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023, dengan target, realisasi dan pencapaian kinerja sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk miskin	5,15%	5,85%	113,59
2.	Persentase penanganan PMKS	6,86%	23,95%	349,12
3.	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan	12 Laporan	100
4.	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan	12 Laporan	100
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	100
6.	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%	100 %	100
7.	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%	84,61%	105,76
Rata-Rata Capaian				138,35

Dari uraian tabel tersebut diatas capaian kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023, rata-rata capaian dari ke dua indikator sasaran tersebut adalah 138,35% dengan skala kriteria diperoleh dengan **predikat sangat berhasil** Realisasi dan pencapaian kinerja diperoleh dengan formulasi pengukuran yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
1.	Persentase penduduk miskin	Realisasi Hasil Perhitungan BPS
2.	Persentase penanganan PMKS	$= \frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$ $= \frac{3.226}{16.051} \times 100\%$ $= 20,09 \%$ <p>Untuk mendapatkan realisasi tahun 2023 maka di akumulasikan dengan tahun 2021 sebesar 3,86%, sehingga perhitungannya menjadi:</p> $= 20,09\% + 3,86\%$ $= 23,95 \%$
3.	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	<p>laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku</p> $= \frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100 \%$
4.	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	<p>laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif</p> $= \frac{12}{12} \times 100\%$ $= 100 \%$
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$= \frac{\text{Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}}{\text{Jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$ $= \frac{400}{400} \times 100\%$ $= 100\%$
6.	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	$= \frac{\text{Jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan}}{\text{Jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan}} \times 100\%$ $= \frac{5}{5} \times 100\%$ $= 100\%$

No	Uraian	Perhitungan Capaian Sasaran
7.	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM di dapatkan dari laporan SKM Dinas Sosial = 84,61%

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah 16.051 Orang, berdasarkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) per Oktober 2023. Rincian jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bisa dilihat dari tabel berikut.

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
1	2	3	3
1	Anak Balita Terlantar (ABT)	Anak	19
2	Anak Terlantar (AT)	Anak	500
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	Anak	18
4	Anak Jalanan	Anak	6
5	Anak Dengan Kedissabilitas (ADK)	Anak	483
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Anak	23
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	Anak	6
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	1.926
9	Penyandang Disabilitas	Orang	3.393
10	Tuna Susila	Orang	1
11	Gelandangan	Orang	4
12	Pengemis	Orang	-
13	Pemulung	Orang	162
14	Kelompok Minoritas	Orang	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	Orang	207
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	Orang	23
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Orang	25
18	Korban Trafficking	Orang	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	3
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Orang	1
21	Korban Bencana Alam	Orang	26
22	Korban Bencana Sosial	Orang	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	1.117
24	Fakir Miskin (FM)	KK	8.009
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	KK	99

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	KK	-
Total			16.051

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah 384, berdasarkan data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) per Desember 2023. Rincian jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bisa dilihat dari tabel berikut.

No	Jenis PSKS	Satuan	Jumlah	PSKS yang Aktif
1	2	3	4	5
1	Pekerja Sosial Profesional	Orang	1	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	Orang	146	146
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	Orang	84	84
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Lembaga	18	18
5	Karang Taruna (KT)	KT	119	103
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Lembaga	1	1
7	Keluarga Pionir	KK	-	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	Lembaga	-	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	Lembaga	-	-
10	Penyuluh Sosial	Orang	-	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Orang	9	9
12	Dunia Usaha	Pengusaha	6	6
Total			384	368

2. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi tahun 2018-2022 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase PMKS yang tertangani	79,37	175	159	74,24	1.081,93
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	96,38	41,10	38	18,73	302,50
Rata-Rata Realisasi Capaian		87,87	108,05	98,50	46,48	692,22

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026, untuk capaian realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)
		2023
1.	Persentase penduduk miskin	113,59
2.	Persentase penanganan PMKS	349,12
Rata-Rata Realisasi Capaian		231,35

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2018-2023, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2018 adalah 87,87%, tahun 2019 adalah 108,05%, tahun 2020 adalah 98,5%, tahun 2021 adalah 46,48%, tahun 2022 adalah 692,22%, dan tahun 2023 adalah 231,35% ini berarti capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sangat berhasil, tahun 2021 capaian kinerjanya tidak berhasil, tahun 2022 dan 2023 capaian kinerjanya sangat berhasil.

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja, untuk capaian realisasi tahun 2019-2022 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	36,51	574,60	2.214,28

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	100	100
Rata-Rata Realisasi Capaian		100	68,25	337,30	1.157,14

Realisasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja, untuk capaian realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)
		2023
1.	Persentase penduduk miskin	113,59
2.	Persentase penanganan PMKS	349,12
3.	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	100
4.	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
6.	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100
7.	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	105,76
Rata-Rata Realisasi Capaian		138,35

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2019-2023, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah 100%, tahun 2020 adalah 68,25%, tahun 2021 adalah 337,30%, tahun 2022 adalah 1.157,14%, dan tahun 2023 adalah 138,35% ini berarti capaian kinerja tahun 2019 adalah sangat berhasil, tahun 2020 adalah cukup berhasil, tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sangat berhasil.

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin”

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 memiliki Sasaran “Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin” yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu persentase PMKS yang tertangani dan persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial. Realisasi capaian kinerja indikator sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, untuk capaian realisasi indikator sasaran strategis dari tahun 2018 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut.

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase PMKS yang tertangani	79,37	175	159	74,24	1.081,93
2.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	96,38	41,10	38	18,73	302,50
Rata-Rata Realisasi Capaian		87,87	108,05	98.50	46,48	692,22

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2018-2022, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2018 adalah 87,87% tahun 2019 adalah 108,05% tahun 2020 adalah 98,5% tahun 2021 adalah 46,48% dan tahun 2022 adalah 692,22% ini berarti capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sangat berhasil, tahun 2021 capaian kinerjanya cukup berhasil dan tahun 2022 capaian kinerjanya sangat berhasil.

Analisis capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026

Sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase penduduk miskin”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin” dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase penduduk miskin	-	5,15%	5,85%	113,59	4,90%

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja tahun 2023, maka capaian kinerja indikator sasaran “Persentase penduduk miskin” adalah 113,59% dengan **predikat tidak berhasil karena realisasi persentase penduduk miskin itu semakin tinggi reealisainya dari pada target yang di tetapkan maka keberhasilan dalam penurunan kemiskinan tidak tercapai. Sehingga dengan tidak berhasilnya penurunan penduduk miskin dijawab dengan memaksimalkan program-program kegiatan yang ada untuk penanganan kemiskinan.** Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase penduduk miskin” diperoleh dari hasil perhitungan BPS yaitu 5,85%.

Pencapaian indikator sasaran “Persentase penduduk miskin” didukung juga dengan pemberian bantuan sembako isidentil (beras) kepada Fakir Miskin dengan target sebanyak 124 orang, terealisasi 124 orang, Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada kemiskinan ekstrim dengan target sebanyak 349 orang, terealisasi 348 orang, bantuan bibit ternak babi untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan Fakir Miskin dengan target 5 KUBE dengan masing-masing KUBE terdiri dari 10 orang, terealisasi 5 KUBE, dan bantuan sosial barang berupa paket sembako (beras, gula merah, dan kacang

ijo) kepada LKSA dan Panti Asuhan dengan target sebanyak 3 lembaga, terealisasi 3 lembaga.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS”

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran yaitu “Persentase penanganan PMKS”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS” dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase penanganan PMKS	-	6,86%	23,95%	349,12	9,86%

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja tahun 2023, maka capaian kinerja indikator sasaran “Persentase penanganan PMKS” adalah 349,12% dengan **predikat sangat berhasil**. Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase penanganan PMKS diperoleh dari hasil perhitungan jumlah PMKS yang tertangani (3.226 orang) dibagi dengan jumlah PMKS yang ada (16.051) dikalikan 100%, diakumulasikan dengan hasil perhitungan tahun 2021 sebanyak 3,86% sehingga memperoleh realisasi sebesar 23,95%.

Perhitungan jumlah PMKS yang tertangani (3.226 orang) diperoleh dari: pemberian paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada lanjut usia dengan target sebanyak 400 orang, terealisasi 400 orang, bantuan sosial bibit ternak babi kepada lanjut usia produktif dengan

target sebanyak 30 orang, terealisasi 30 orang, bantuan sosial uang kepada lanjut usia dengan target sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas dengan target 30 orang (alat bantu dengar 5 orang, kursi roda 20 orang, tongkat ketiak 5 orang), terealisasi 30 orang (alat bantu dengar 5 orang, kursi roda 20 orang, tongkat ketiak 5 orang), penanganan gelandangan dan pengemis dengan target 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 400 orang, terealisasi 400 orang, Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 1.631 orang, terealisasi 1.596 orang, bantuan bibit ternak babi kepada penyandang disabilitas produktif dengan target sebanyak 20 orang, terealisasi 20 orang, bantuan sosial uang melalui lembaga kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada anak terlantar dengan target sebanyak 150 orang, terealisasi 150 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan target sebanyak 200 orang, terealisasi 200 orang, dan bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada Eks Napi sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Analisis capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019-2022 yang memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” dengan indikator Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif” dengan indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) yang aktif. Realiasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2019-2022 sebagai berikut.

No	Indikator Sasaran Startegis	Realisasi Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022
1.	Persentase kemandirian Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100	36,51	574,60	2.214,28
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100	100	100	100
Rata-Rata Realisasi Capaian		100	68,25	337,30	1.157,14

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja dari tahun 2019-2022, maka rata-rata realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah 100% tahun 2020 adalah 68,25% tahun 2021 adalah 337,30% dan tahun 2022 adalah 1.157,14 ini berarti capaian kinerja tahun 2019 adalah sangat berhasil, tahun 2020 adalah tidak berhasil, tahun 2021 dan 2022 adalah sangat berhasil.

Sasaran “Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 2.214,28%, dengan predikat **Sangat Berhasil**.

- a. Persentase kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Realisasi pencapaian Persentase Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk tahun 2022 sebesar 13,95% diperoleh dari jumlah PMKS penerima bantuan sosial (2.001 Orang) dibandingkan dengan jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan (14.339 Orang, berdasarkan data PMKS

per Oktober 2022) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 2.214,28%.

Sasaran “Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”.

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran Terwujudnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif meliputi 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat **Sangat Berhasil**

a. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Realisasi pencapaian Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif sebesar 80%, diperoleh dari jumlah PSKS yang aktif (218) dibandingkan dengan jumlah PSKS tahun sekarang (272) dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan target diperoleh angka capaian sebesar 100%.

Untuk tahun 2023 sasaran penjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berbeda dengan sasaran tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan sasaran penjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023, memiliki 5 (lima) sasaran yaitu sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin” dengan indikator sasaran “Persentase penduduk miskin”, sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS” dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu “Persentase penanganan PMKS”, “Jumlah laporan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku”, dan “Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif”, sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana” indikator sasaran “Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat”, sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan” dengan indikator “cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan”, dan sasara “Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial” dengan indikator “Persentase capaian IKM Dinas Sosial”. Realisasi capaian kinerja indikator sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase penduduk miskin	-	5,15%	5,85%	113,59	4,90%
2	Persentase penanganan PMKS	-	6,86%	23,95%	349,12	9,86%
3.	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
4.	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
5.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100 %	100%	100	100 %
6.	Cakupan perlindungan	-	100 %	100 %	100	100 %

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
	terhadap nilai kepahlawanan					
7.	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	-	80 %	84,61%	105,76	80 %
Rata-Rata Capaian					138,35	

Bila dilihat dari capaian realisasi kinerja tahun 2023, maka rata-rata capaian realisasi indikator kinerja untuk semua sasaran berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng tahun 2023 adalah 138,35%, dengan predikat sangat berhasil.

Sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 113,59%, dengan **predikat tidak berhasil karena realisasi persentase penduduk miskin itu semakin tinggi realisasinya dari pada target yang di tetapkan maka keberhasilan dalam penurunan kemiskinan tidak tercapai. Sehingga dengan tidak berhasilnya penurunan penduduk miskin dijawab dengan memaksimalkan program-program kegiatan yang ada untuk penanganan kemiskinan.** Indikator kinerja sasaran “Menurunnya Penduduk Miskin” sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase penduduk miskin	-	5,15%	5,85%	113,59	4,90%

a. Persentase Penduduk Miskin

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase penduduk miskin” diperoleh dari hasil perhitungan BPS yaitu 5,85%. Pencapaian indikator sasaran “Persentase penduduk miskin” didukung juga dengan pemberian bantuan sembako isidentil (beras) kepada Fakir Miskin dengan target sebanyak 124 orang, terealisasi 124 orang, Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada kemiskinan ekstrim dengan target sebanyak 349 orang, terealisasi 348 orang, bantuan bibit ternak babi untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dan Fakir Miskin dengan target 5 KUBE dengan masing-masing KUBE terdiri dari 10 orang, terealisasi 5 KUBE, dan bantuan sosial barang berupa paket sembako (beras, gula merah, dan kacang ijo) kepada LKSA dan Panti Asuhan dengan target sebanyak 3 lembaga, terealisasi 3 lembaga.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS” terdiri dari 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan rata-rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 183,04%, dengan **predikat sangat berhasil** Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Penanganan PMKS” sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase penanganan PMKS	-	6,86%	23,95%	349,12	9,86%
2.	Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
3.	Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan
Rata-Rata Capaian					183,04	

a. Persentase Penanganan PMKS

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase penanganan PMKS” diperoleh dari hasil perhitungan jumlah PMKS yang tertangani (3.226 orang) dibagi dengan jumlah PMKS yang ada (16.051) dikalikan 100%, diakumulasikan dengan hasil perhitungan tahun 2021 sebanyak 3,86% sehingga memperoleh realisasi sebesar 23,95%.

Perhitungan jumlah PMKS yang tertangani (3.226 orang) diperoleh dari: pemberian paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada lanjut usia dengan target sebanyak 400 orang, terealisasi 400 orang, bantuan sosial bibit ternak babi kepada lanjut usia produktif dengan

target sebanyak 30 orang, terealisasi 30 orang, bantuan sosial uang kepada lanjut usia dengan target sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan alat bantu kepada penyandang disabilitas dengan target 30 orang (alat bantu dengar 5 orang, kursi roda 20 orang, tongkat ketiak 5 orang), terealisasi 30 orang (alat bantu dengar 5 orang, kursi roda 20 orang, tongkat ketiak 5 orang), penanganan gelandangan dan pengemis dengan target 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 400 orang, terealisasi 400 orang, Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 1.631 orang, terealisasi 1.596 orang, bantuan bibit ternak babi kepada penyandang disabilitas produktif dengan target sebanyak 20 orang, terealisasi 20 orang, bantuan sosial uang melalui lembaga kepada penyandang disabilitas dengan target sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada anak terlantar dengan target sebanyak 150 orang, terealisasi 150 orang, bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan target sebanyak 200 orang, terealisasi 200 orang, dan bantuan paket sembako isidentil (beras, gula pasir, kecap manis, mie instan, minyak goreng) kepada Eks Napi sebanyak 100 orang, terealisasi 100 orang.

b. Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku” diperoleh dari jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku yang dilaporkan setiap bulannya, sehingga memperoleh realisasi sebesar 100%.

c. Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif” diperoleh dari jumlah laporan Potensi

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif yang dilaporkan setiap bulannya, sehingga memperoleh realisasi sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Sasaran “Meningkatnya penanganan korban bencana”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Meningkatnya penanganan korban bencana” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat sangat berhasil Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya penanganan korban bencana” sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	-	100%	100%	100	100 %

a. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat” diperoleh dari hasil perhitungan jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (400 orang) dibagi jumlah korban bencana selama masa tanggap darurat (400 orang) dikalikan 100%, sehingga memperoleh realisasi sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Penanganan Bencana

Sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100%, dengan predikat sangat berhasil Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan” sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	-	100%	100%	100	100 %

a. Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan” diperoleh dari hasil perhitungan jumlah perlindungan terhadap nilai kepahlawanan (5 Monumen/Tugu Perjuangan) dibagi dengan jumlah perlindungan nilai kepahlawanan yang seharusnya dilaksanakan (5 Monumen/Tugu Perjuangan) dikalikan 100%, sehingga memperoleh realisasi sebesar 100%.

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program:

1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Sasaran “Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial”

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran capaian indikator sasaran “Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial” terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran, yang memperlihatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 105,76%, dengan **predikat sangat berhasil** Indikator kinerja sasaran “Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial” sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023			Target 2024
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	-	80%	84,61%	105,76	80 %

a. Persentase capaian IKM Dinas Sosial

Realisasi pencapaian indikator sasaran “Persentase capaian IKM Dinas Sosial” diperoleh dari laporan SKM Dinas Sosial sehingga memperoleh nilai 84,61%

Pencapaian target indikator sasaran dilaksanakan melalui program berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar Nasional yang bisa dipakai pembandingan untuk kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah Standar Nasional berupa Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam program Keluarga Harapan Target Nasionalnya adalah 10.000.000 (sepuluh juta) keluarga penerima manfaat (KPM) yang disasar di seluruh Indonesia. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng memfasilitasi kegiatan pusat (Kementerian Sosial) yaitu Program PKH. Adapun perbandingan realisasi kinerja sebagai berikut:

Target Nasional PKH	Realisasi kinerja tahun 2023	Prosentse yang dicapai	Keterangan
10.000.000 KPM	27.098 KPM	0,27%	Perbandingan target nasional dengan sasaran kpm yang ada di kabupaten Buleleng.

Dari prosentase yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa target nasional Program keluarga Harapan yang ada di Kabupaten Buleleng tercapai 0,27% atau 27.098 Keluarga yang mendapat program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan sangat bermanfaat dalam penanganan kemiskinan dan juga bermanfaat untuk pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan anak.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- a. Pencapaian kinerja tidak terlepas dari faktor internal dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari tenaga PNS dan tenaga kontrak kerja maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Satuan Polisi Pamong Praja, Polres dan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga sosial.
- c. Tingginya peran serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial antara lain Pekerja Sosial Profesional, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna (KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Tenaga Kersejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan dunia usaha.
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat melalui lembaga sosial dalam penanganan masalah sosial, antara lain Panti Asuhan, Corporate Social Responcibility (CSR) Dunia Usaha, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lainnya.
- e. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dalam penanganan masalah sosial dengan instansi terkait antara lain Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Bali, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain :

- a. Belum Validnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- b. Belum maksimalnya Desa / Kelurahan dalam melaksanakan musdes/muskel

- c. Terbatasnya sumberdaya pelaksana kegiatan penanganan PMKS.
- d. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan PMKS.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, upaya/alternatif yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data ke Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan musdes/muskel untuk perbaikan data DTKS.
- b. Mengoptimalkan kinerja sumberdaya pelaksana dan meningkatkan kerjasama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta pendamping PKH (Program Keluarga Harapan).
- c. Bekerjasama dengan pihak ketiga (CSR) dalam menangani PMKS.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian Kinerja Organisasi tidak terlepas dari potensi sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terhadap hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang ada terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 27 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 26 orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1 orang. Tenaga kontrak kerja sebanyak 105 orang, sebanyak 67 orang sebagai operator SIK-NG, operator komputer, administrasi umum, administrasi keuangan, kearsipan, sopir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. Tenaga kontrak kerja sebanyak 4 orang bertugas di Taman Makam Pahlawan “Curastana”. Tenaga kontrak kerja sebanyak 34 orang bertugas di Monumen/Tugu Perjuangan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial antara lain: Monumen Jagaraga di Desa Jagaraga, Monumen Tri Yudha Sakti di Kecamatan Sukasada, Monumen Ayodya Pura di Desa Selat, Monumen Bhuana Kertha di Desa Panji, Tugu Perjuangan Wira Bhuana di Desa Gitgit.
- b. Kurangnya tenaga yang memiliki pendidikan pekerjaan sosial khususnya dalam rangka penanganan masalah sosial yang membutuhkan teori social worker.

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dijabarkan menjadi 6 (enam) program, 11 (sebelas) kegiatan, dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan. Dari program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut terdiri dari program penunjang sebanyak 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dan program wajib sebanyak 5 (lima) program, 6 (enam) kegiatan, dan 18 (delapan belas) sub kegiatan. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, pada dasarnya secara keseluruhan telah mendukung terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023. Namun ada kegiatan yang secara kuantitatif belum tercapai realisasi target fisiknya 100% yaitu:

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, ini disebabkan karena target pemberian Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada kemiskinan ekstrim sebanyak 349 orang terealisasi 348 orang, tidak terealisasi 1 (satu) orang karena tidak berada di wilayah Desa Pakisan.
- b. Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat ini disebabkan karena target pemberian Bantuan Sosial Uang (BSU) kepada penyandang disabilitas sebanyak 1.631 orang, terealisasi 1.596 orang, tidak terealisasi karena termasuk penerima Bantuan Sosial Uang (BSU) kemiskinan ekstrim, meninggal dunia, tidak ditemukan, pindah alamat dan termasuk orang yang sudah mampu.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dari sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

NO	Sasaran Strategis		Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
I	Menurunnya Penduduk Miskin	1.	Program Pemberdayaan Sosial	2.441.667.299	2.415.289.232	98,92
		2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	648.387.738	632.393.077	97,53
II	Meningkatnya Penanganan PMKS	1.	Program Rehabilitasi Sosial	6.964.155.468	6.767.903.635	97,18
Program lainnya yang mendukung Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng						
		1.	Program Penanganan Bencana	230.164.253	215.234.812	93,51
		2.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.241.782.921	1.217.061.201	98,01
		3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6.334.641.787	6.139.703.277	96,92

NO	Sasaran Strategis		Program	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Capaian Keuangan (%)
			Daerah Kabupaten Buleleng			
Total				17.860.799.466	17.387.585.234	97,35

Faktor keberhasilan/kegagalan realisasi keuangan

1. Karena ada masyarakat yg tidak mengambil bantuan sehingga uang dikembalikan ke kas daerah

Tingkat Efisiensi Anggaran

1. Dari program wajib yang menunjang Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Buleleng dengan anggaran sebesar Rp.17.860.799.466,00 terealisasi sebesar Rp.17.387.585.234,00 atau 97,35%. Ini disebabkan adanya dana bantuan sosial yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terealisasi 100% sehingga mempengaruhi efisiensi anggaran yang besar pada Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
2. Dalam belanja barang dan jasa menggunakan harga sesuai dengan hasil konsolidasi dan E-Katalog Lokal sehingga ada efisiensi belanja.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan memperhatikan hasil analisis Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana diuraikan dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja, secara makro pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik dan benar, serta mengarah kepada pencapaian tujuan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yaitu “Meningkatnya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial”, dengan indikator tujuan “Persentase penduduk miskin”.

Namun demikian, terdapat beberapa sasaran yang belum tercapai yang akan diupayakan perbaikannya. Penataan ulang terhadap perancangan program dan kegiatan di tahun mendatang yang mengarah pada penanganan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama.

Menyadari hal tersebut, langkah mengoptimalkan kinerja aparatur dan memobilisasi peran para pemangku kepentingan diperlukan agar hasil program, kegiatan dan keluaran sub kegiatan semakin bermanfaat dan tepat sasaran. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan untuk perbaikan pembuatan laporan ini dimasa mendatang.

B. Langkah Perbaikan ke Depan

Langkah perbaikan ke depan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar anggaran yang diberikan kepada OPD sesuai dengan sasaran SPM yang dimiliki oleh OPD tersebut.
2. Dibentuk TIM verifikasi dan validasi data untuk menuju data yang valid.
3. Peraturan dalam penyusunan dokumen kegiatan diterbitkan lebih awal.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melaksanakan program/kegiatan yang ada pada Dinas Sosial.

LAMPIRAN 1



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
JALAN VETERAN NO 7 TELEPEON: 0362-21248
SINGARAJA

Web: <http://dinsos.bulelengkab.go.id>

Email: dinassosialbuleleng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

Nomor: 400.9/2248.1/Dinsos/2022

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026.

- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 22 Maret 2022

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Buleleng,



Putu Kahaman Putra, S.Sos, MM

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19691231 199103 1 053

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Nomor : 400.9/2248.1/Dinsos/2022

Tanggal : 22 Maret 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL
KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial, sesuai dengan: 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	Hasil Perhitungan BPS	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	BPS adalah Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase Penanganan PMKS	%	Meningkatkan dan pemerataan pelayanan sosial bagi penyandang masalah sosial, sesuai dengan: 1. UU nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 2. Permensos: 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial)	Jumlah PMKS yang tertangani -----X 100% Jumlah PMKS yang ada	Dinas Sosial Kabupaten Buleleng	PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.

LAMPIRAN 2



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS SOSIAL
Jalan Veteran No. 7 Telepon / Fax. (0362) 21248
SINGARAJA

Web : dinsos.bulelengkab.go.id

Email : dinsos@bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Ketut Lihadnyana

Jabatan : Pj. Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Ketut Lihadnyana

Singaraja, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA,

I Putu Kariaman Putra, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG**

NO	SASARAN STRATEGIS (PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menurunnya penduduk miskin	Persentase penduduk miskin	5,15%
2	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS	6,86%
		Jumlah laporan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai aturan yang berlaku	12 Laporan
		Jumlah laporan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	12 Laporan
3	Meningkatnya penanganan korban bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%
4	Meningkatnya perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	Cakupan perlindungan terhadap nilai kepahlawanan	100%
5	Meningkatnya capaian IKM Dinas Sosial	Persentase capaian IKM Dinas Sosial	80%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.334.641.787	APBD II
2 Program Pemberdayaan Sosial	Rp 2.441.667.299	APBD II
3 Program Rehabilitasi Sosial	Rp 6.964.155.468	APBD II
4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 648.387.738	APBD II
5 Program Penanganan Bencana	Rp 230.164.253	APBD II
6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 1.241.782.921	APBD II

Singaraja, 26 Oktober 2023


Ketut Lihadnyana
Ketua Lihadnyana


I Putu Karijama Putra, S.Sos, MM
Kepala Dinas Sosial,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691231 199103 1 053

LAMPIRAN 3

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
BULAN JANUARI S/DESEMBER TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eselon II																
Kepala Dinas																
1	Menurunnya penduduk miskin	1 Persentase penduduk miskin	%	5,15	Januari	-	-	-		1 Program Pemberdayaan Sosial	2.441.667.299	Januari	-	-	-	Karena kelengkapan untuk pencairan SPJ belum lengkap
					Pebruari	-	-	-				Pebruari	37.095.524	21.208.036	57,17	Karena adanya pergeseran anggaran di bulan februari, SPJ masih dalam proses
					Maret	-	-	-				Maret	255.088.183	27.046.833	10,60	Karena: (1) proses pencairan hibah tinggal pencairan di keuangan (2) pencairan SPJ pegawai kontrak dibayarkan di bulan berikutnya sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dibulan tersebut (3) sembako yang bersifat insidental sehingga mempengaruhi realisasi keuangan dan fisik . Karena dinsos menunggu usulan dari desa atau kelurahan.